

KEBIJAKAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KULTUR RELIGIUS MAHASISWA

Rini Setyaningsih

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

rinisetyaningsih28@gmail.com

Subiyantoro

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

sbytoro@ymail.com

Abstract

INTERNALIZATION POLICY OF ISLAMIC VALUES IN THE FORMATION OF RELIGIOUS STUDENTS CULTURE. This study aims to determine how to find out the background of LPSI policy formulation, the method of internalization of Islamic values and the process of creating a student's religious culture. In the implementation used qualitative approach with the techniques of interview, documentation, and observation, data analysis using qualitative descriptive technique. The result of the research showed that the background of LPSI policy formulation was based on the mission of the institution and 3 reasons for the establishment of LPSI, namely: (1) the theological reason of al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar; (2) objective sociological reasons that encourage indakwah islamiyah; And (3) reasons for structural responsibility as Muhammadiyah universities. The internalization methods used were: (1) the academic domain, through the courses of Al-Islam and Kemuhammadiyah (AIK) and the certification of lecturers, and the reference equation. (2) non-academic sphere, LPSI cooperated with student organizations in the form of studies, training and Islamic competitions. The process of creating a student's religious culture began

with the vision, mission and objectives of LPSI which then breakdown into several policies: first, it was obligatory to follow AIK courses and certification (dimension of aqidah). Secondly, it is obligatory to follow the Qur'an Reading Test (TBQ) and the guidance of Qur'anic tahsinul (syari'ah dimension). (3) the obligation of wearing syar'i dress (moral dimension) with a structural model (top-down).

Keywords: *Policy, internalization of values, religious culture.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah latar belakang perumusan kebijakan LPSI, metode internalisasi nilai-nilai Islam serta proses penciptaan kultur religius mahasiswa. Dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik depth-interview, dokumentasi, dan observasi, analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perumusan kebijakan LPSI dilandasi dari misi lembaga dan 3 alasan pendirian LPSI, yaitu: (1) alasan teologi *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*; (2) alasan objektif sosiologis yang mendorong syiar dakwah keislaman; dan (3) alasan tanggung jawab struktural sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah. Metode internalisasi yang digunakan yaitu: (1) ranah akademik, melalui mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan sertifikasi dosen pengajar, dan persamaan referensi. (2) ranah non-akademik, LPSI bekerjasama dengan organisasi mahasiswa dalam bentuk kajian, pelatihan dan lomba Islami. Proses penciptaan kultur religius mahasiswa berawal dari visi, misi dan tujuan LPSI yang kemudian di *breakdown* ke beberapa kebijakan: pertama, wajib mengikuti mata kuliah AIK dan sertifikasi (dimensi akidah). Kedua, wajib mengikuti Tes Baca al-Qur'an (TBQ) serta bimbingan tahsinul Qur'an (dimensi syari'ah). Ketiga, wajib berbusana syar'i (dimensi akhlak) dengan model struktural (*top-down*).

Kata kunci: *Kebijakan, internalisasi nilai, kultur religius.*

A. Pendahuluan

Budaya disebuah lembaga pendidikan merupakan elemen penting yang dipengaruhi oleh nilai dan kepercayaan yang menjadi

asas dan visi sebuah lembaga. Sebuah budaya yang ada di lembaga dipengaruhi oleh semua warga yang ada di dalamnya. Pengelola lembaga tentunya yang mempunyai tanggungjawab besar dalam menjalankan aktivitas visi dan misi yang merupakan haluan sebuah lembaga. Maka diperlukan beberapa kebijakan dari pengelola lembaga pendidikan atau sekelompok orang yang berwenang dalam mengambil kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan yang mengacu kepada visi dan misi merupakan pengaruh yang penting dalam membentuk budaya disebuah lembaga pendidikan.

Pendidikan adalah keseluruhan usaha untuk mentransformasikan ilmu, pengetahuan, ide, gagasan, norma, hukum, dan nilai-nilai kepada orang lain dengan cara tertentu, baik struktural, formal, dan non-formal dalam suatu sistem pendidikan nasional. Produk pendidikan memiliki budaya yang didefinisikan masyarakat yang berperadaban, memiliki kebebasan yang merefleksikan kreatifitas dalam dinamikanya secara komprehensif menuju kehidupan yang sejahtera diatur oleh norma hukum yang kuat, sebagaimana dicita-citakan masyarakat dan bangsa. (Syaiful Sagala, 2000: 10).

Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 menjelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Khotimah & Fathurrohman, 2014: 232).

Secara terperinci tujuan pendidikan Nasional dijelaskan pula dalam pasal 3 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggungjawab.(Khotimah & Fathurrohman, 2014: 233).

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus menjadi pondasi untuk pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya. Filosofis dalam kebijakan pendidikan pada dasarnya dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.(Hasbullah, 2015: 29).Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun tertentu.(Tilaar & Nugroho, 2012: 140).Sehingga, seluruh pelaksanaan serta evaluasi kebijakan pendidikan menuntut peran aktif dari para pendidik profesional karena dari mereka dapat disusun hasil-hasil kebijakan yang dapat mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional.

Pendidikan agama mulai digugat eksistensinya sejak pemikiran manusia memasuki tahap positif dan fungsional sekitar abad ke-18. Suasana kehidupan modern dengan kebudayaan yang sangat kuat serta terpenuhinya berbagai mobilitas kehidupan secara teknologis-mekanis, pada satu sisi telah melahirkan krisis etika dan moral. Munculnya fenomena *white collar crime* (kejahatan kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh kaum berdasi) yang dilakukan oleh para elit, merupakan indikasi kongkrit bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensional(Sahlan, 2011: 37).

Melihat fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal karena masing-masing orang mengedepankan kepentingan dan egonya sendiri-sendiri. Krisis moral tersebut tidak hanya melanda masyarakat lapisan bawah (*grass root*), tetapi juga meracuni atmosfir birokrasi negara mulai dari tingkat paling atas sampai paling bawah.

Pada abad pertengahan yang penuh dengan kejayaan di bidang ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat nilai-nilai al-

Qur'an yang digali oleh para ilmuwan muslim kenamaan seperti al-Kindi, Ibn Rusyd, Ibn Sina, al-Ghazali, dan lain-lain. Peradaban yang dikembangkan oleh setiap komunitas itu memang terbukti telah mampu melahirkan apa yang disebut *civilized community* yang diiringi dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan serta kemudahan hidup akibat dari hasil-hasil teknologi yang telah mereka capai.

Pengembangan ilmu pengetahuan tidak cukup dirumuskan dari kebenaran (*justification*) ilmu itu sendiri, melainkan harus dilihat bagaimana konteks penemuannya (*context of discovery*) dengan tata nilai, etika dan moral. Sehingga ilmu dapat memberikan kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin, bukan memberikan ilmu yang kering dan hanya bersifat fisik material belaka. Ilmu pengetahuan tidak boleh dipandang dari sisi praktisnya belaka, atau hanya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan materi duniawi saja, melainkan harus terbuka pada konteksnya, yakni nilai-nilai agama. Ilmu pengetahuan harus menjadi jembatan untuk memahami hakikat ketuhanan. (Furchan, 2004: 44). Perspektif keilmuan semacam ini akan memberikan peluang besar bagi proses Islamisasi di era globalisasi.

Perguruan Tinggi Islam diharapkan mampu mencetak figur-figur ulamayang intelek profesional atau profesional yang ulama. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Islam perlu untuk mengadakan perekonfigurasi tujuan institusionalnya dengan memperhatikan berbagai tuntutan masyarakat dan zaman yang terus berubah. Jika tidak, maka Pendidikan Tinggi Islam tidak pernah bertahan hidup dalam budaya dan umatnya sendiri seiring dengan pergeseran nilai yang semakin deras. (Sahlan, 2011: 3). Maka internalisasi nilai-nilai Islam di Perguruan Tinggi Islam sangat penting untuk dilakukan, agar terdapat keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan penanaman keimanan dan ketakwaan (Imtaq). Dengan demikian Perguruan Tinggi Islam akan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, yakni selain memiliki pengetahuan dan keahlian juga memiliki bekal ilmu pengetahuan agama, moral, akhlak yang mulia, serta amal shalih.

Usaha penanaman nilai-nilai religius dalam rangka mewujudkan budaya religius di Perguruan Tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pendidikan di Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah internal mahasiswa yang secara psikologis sudah mencapai usia dewasa. Begitu pula pada aspek pembelajaran lainnya, seperti kurikulum, sistem evaluasi dan kompetensi dosen. Secara eksternal, pembelajaran di Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah tren perkembangan zaman yang sangat susah dikendalikan seperti, etika pergaulan, perkembangan teknologi informasi dan masalah sosial lainnya. (Sahlan, 2011: 55). Menghilangkan semua masalah tersebut sangat jelas suatu hal yang tidak instan, namun dapat dilakukan apabila seluruh civitas akademika secara bersama-sama berusaha menghapuskan dampak negatif yang ditimbulkan dunia luar dengan merumuskan visi dan misi yang religius, pelaksanaan pembelajaran yang integratif dan penciptaan suasana yang religius.

Universitas Ahmad Dahlan memiliki 5 kampus, namun dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek kajian di UAD kampus 3, karena di sana terdapat Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), dan Fakultas Farmasi dimana fakultas-fakultas tersebut merupakan fakultas yang menjurus pada ilmu umum. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam LPSI dalam pembentukan kultur religius mahasiswa di UAD kampus 3.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah latar belakang perumusan kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam LPSI di UAD kampus 3, 2) Bagaimanakah metode internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembentukan kultur religius mahasiswa di UAD kampus 3, 3) Bagaimanakah proses penciptaan kultur religius mahasiswa di UAD kampus 3, 4) Bagaimanakah evaluasi kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam LPSI dalam pembentukan kultur religius mahasiswa di UAD kampus 3.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2013: 15). Untuk subyek penelitiannya, peneliti menentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, yakni suatu teknik sampling atau teknik pengambilan informan (sumber data) dengan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti sendiri. Sebagaimana diketahui dalam penelitian kualitatif, peneliti akan memasuki situasi sosial tertentu, melakukan pengamatan dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial dalam obyek penelitian peneliti. (Sugiyono, 2007: 53-54). Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) dalam pembentukan kultur religius mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta kampus 3.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, maka dari itu tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2007: 64). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 3 cara, yaitu: 1) teknik observasi, peneliti mengamati seluruh aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa UAD kampus 3. Seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa pada jam-jam efektif ataupun jam istirahat serta keunikan-keunikan yang ada di kampus 3 tersebut; 2) teknik dokumentasi, peneliti menggali informasi dari dokumen-dokumen apa saja yang ada hubungannya dengan kajian peneliti, semisal: agenda kegiatan LPSI, hasil evaluasi kegiatan, foto kegiatan, rekaman video, dan dokumen-dokumen lainnya terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh LPSI di Universitas Ahmad Dahlan, terkhusus

untuk mahasiswa; 3) teknik wawancara mendalam, peneliti menggali informasi yang terkait dengan implementasi, metode internalisasi nilai Islam, proses pembentukan kultur religius dan evaluasi kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) dalam pembentukan kultur religius mahasiswa.

B. Pembahasan

1. Kebijakan dalam Pendidikan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan *ke-* dan akhiran *-an*. Kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran atau garis haluan. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 198). Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. (Imron, 2001: 1). Hal tersebut searah dengan pendapat Harman yang dikutip oleh Les Bell dan Howard Stevenson bahwa kebijakan dapat dianggap sebagai posisi atau sikap yang dikembangkan dalam menanggapi masalah atau isu konflik dan diarahkan menuju tujuan tertentu. *“Policy can also be thought of as a position or stance developed in response to a problem or issue of conflict, and directed towards a particular objective.”* (Bell & Stevenson, 2006: 14).

Friedrik dalam bukunya Sholichin Abdul Wahab mengartikan sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (Wahab, 1991: 13). Kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan bobot serta validitas dari kebijakan

tersebut. Pendidikan merupakan suatu ilmu praksis yang berarti kesatuan teori dan praktik. Maka kebijakan pendidikan terletak dalam tatanan normatif dan tatanan deskriptif.

Berkaitan dengan kebijakan pendidikan, Alisyahbana mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor diluar pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. (Wahab, 1991: 19) Tilaar memiliki anggapan bahwa pengertian kebijakan pendidikan dapat dilahirkan melalui pengertian mengenai hakikat proses pendidikan itu sendiri. Artinya kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan manusia menjadi manusia merdeka. Sehingga kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumus langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. (Tilaar & Nugroho, 2012: 136).

Jadi, kebijakan (*policy*) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok orang dalam memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. Pengertian ini lebih mendekati kebenaran, karena keputusan-keputusan yang diambil harus memiliki agenda atau tujuan tertentu dan merupakan upaya pemecahan masalah yang ada di sebuah lembaga. Seorang pemimpin senantiasa harus berpedoman untuk pemenuhan visi dan misi lembaga dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.

b. Tahapan Pembuatan Kebijakan

Pembuatan kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak komponen ataupun variabel yang harus dikaji. Para ahli membagi proses-proses penyusunan kebijakan kedalam beberapa tahapan. Namun, beberapa nilai dalam pembagian tahap-tahap ini terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain sesuai dengan perspektif masing-masing.

Pal dalam Yoyon Bachtiar Irianto(2011 : 35), mengemukakan empat elemen yang saling berkaitan dalam pembuatan kebijakan, yaitu: 1) Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi; 2) Isu kebijakan itu sendiri termasuk didalamnya maksud dan tujuan kebijakan; 3) Perumusan masalah dan alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut; 4) Akibat yang terjadi baik yang sesuai dengan lingkungan disekitarnya ataupun tidak.

Kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Maka proses dalam pembuatan kebijakan pendidikan tidak jauh berbeda dengan kebijakan publik, bahkan bisa dianggap sama. Terbentuknya kebijakan meliputi beberapa aspek inti (isu kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan) dan pada setiap aspek memiliki teori sendiri. Dengan kata lain bahwa proses kebijakan adalah tahap gagasan kebijakan, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, baru kemudian menuju kepada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan.

2. Internalisasi Nilai-nilai Islam

a. Makna Internalisasi Nilai-nilai Islam

Internalisasi menurut Kamus Ilmiah Populer adalah pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. (Dahlan, dkk., 1994: 267). Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan suatu nilai pada seseorang yang akan membuat pola pikirnya dalam melihat realitas pengalaman.

Secara epistemologis internalisasi berasal dari kata intern atau internal yang berarti bagian dalam atau menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia internalisasi dapat didefinisikan sebagai penghayatan, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan, penataran, dan sebagainya. (Pengembangan Bahasa, 1989: 336). Internalisasi adalah suatu proses sebagai penghayatan, penguasaan secara mendalam.

Kata nilai dapat dilihat dari segi etimologis dan terminologis, dari segi etimologis nilai adalah harga, derajat. Nilai adalah ukuran untuk menghukum atau memilih tindakan dan tujuan tertentu. (Rosyadi, 2004: 114). Sedangkan dari segi terminologis dapat dilihat berbagai rumusan para ahli. Tapi perlu ditekankan bahwa nilai adalah kualitas empiris yang seolah-olah tidak bisa didefinisikan, hal senada dikatakan Louis Katsoff bahwa nilai tidak bisa didefinisikan tidak berarti nilai tidak bisa dipahami. (Faturrohman, 2015: 52-53). Jadi, nilai dari segi etimologis adalah harga/derajat, dan dari terminologis adalah kualitas empiris yang sulit untuk didefinisikan tetapi tetap bisa untuk difahami substansinya.

Menurut Gordon Alport, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Faturrohman (2015: 54), nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Menurut Fraenkel, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Faturrohman bahwa nilai dapat diartikan sebagai sebuah pikiran (*idea*) atau konsep mengenai apa yang dianggap penting bagi seseorang dalam kehidupannya. Selain itu, kebenaran sebuah nilai juga tidak menuntut adanya pembuktian empirik, namun lebih terkait dengan penghayatan dan apa yang dikehendaki atau tidak dikehendaki, disenangi atau tidak disenangi oleh seseorang. Pengertian nilai yang dipaparkan para tokoh tersebut, dapat diartikan bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang mendasar bagi seseorang atau kelompok orang untuk menentukan/memilih tindakannya atau menilai suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya.

Secara hakiki, nilai agama merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datang dari Tuhan. Struktur mental manusia dan kebenaran mistik-transendental merupakan dua sisi unggul yang dimiliki oleh nilai agama. Karena itu, nilai tertinggi yang harus dicapai adalah adanya keselarasan semua unsur kehidupan. Antara kehendak manusia dengan perintah Tuhan, antara ucapan dan tindakan, atau antara *i'tiqad* dan perbuatan. (Alim, 2006: 28). Nilai Islam mencakup didalamnya keselarasan semua unsur

kehidupan antara apa yang diperbuat manusia dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya.

Agama Islam sebagai agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. memiliki kebenaran yang hakiki. Nilai-nilai dalam agama merupakan petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah hidup seperti ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, sehingga terbentuk pola motivasi, tujuan hidup dan perilaku manusia yang menuju kepada keridhaan Allah. Nilai keislaman dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.

Jadi, internalisasi nilai-nilai Islam adalah suatu proses yang mendalam dalam menghayati nilai-nilai agama Islam yang dipergunakan seseorang dalam menyelenggarakan tata cara hidup serta mengatur hubungan dengan Tuhan (*habl min Allah*), sesama manusia (*habl minan-nas*), dan alam sekitar. Semua nilai tersebut dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh, dan sasarannya menyatu dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadi satu perilaku yang positif.

b. Tahapan dan Metode Internalisasi Nilai-nilai Islam

Muhaimin menjelaskan bahwa dalam proses internalisasi nilai melalui tiga tahapan, yaitu: (Muhaimin, 2008: 301).a) tahapan transformasi nilai, yakni guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan nilai yang kurang baik kepada peserta didik, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal, seperti berbohong merupakan perbuatan yang tidak baik; b) tahap transaksi nilai, yakni tahap penanaman nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau interaksi antar peserta didik dengan guru bersifat interaksi timbal balik. Dalam tahap ini guru tidak hanya menyajikan informasi tentang nilai yang baik dan yang buruk, tetapi juga terlibat untuk melaksanakan dan memberikan respon yang sama tentang nilai itu,

yakni menerima dan mengamalkan nilai-nilai tersebut; c) Tahap transisternalisasi, tahap ini transinternalisasi nilai ini jauh lebih dalam dari pada sekedar transaksi. Dalam tahap ini penampilan pendidikan dihadapkan peserta didiknya bukan lagi pada sisi fisiknya, melainkan lebih kepada sikap mentalnya (kepribadiannya).

Menurut teori Peter L. Berger (1991: 4), bahwa dialektika (interaksi sosio-kultural) fundamental terdiri dari tiga tahapan: a) Eksternalisasi adalah proses pencurahan diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia melalui aktivitas fisik dan mental atau usaha ekspresi manusia atas re-definisinya terhadap nilai yang selama ini diyakini sebagai kebenaran. Ekspresi ini diwujudkan kepada orang lain atau kelompok yang secara kuantitatif lebih besar dengan tujuan untuk mewarnai atau bahkan dalam kondisi ekstrim merubah nilai-nilai semula dengan nilai baru yang diyakini kebenarannya; b) Objektivasi adalah tahap aktivitas manusia menghasilkan suatu realita objektif, yang berada di luar diri manusia atau sebagai upaya re-definisi nilai yang sudah ada pada kepercayaan dalam kesadaran diri manusia. Dalam tahap ini, muncul pertanyaan kritis tentang fungsi, materi, dan beberapa hal lain terkait dengan nilai yang sudah dipahami tersebut. Hasil perenungan kembali yang terkadang dibumbuhi dengan tindakan kontemplatif ini, terkadang melahirkan proposisi nilai atau pemahaman baru yang secara subyektif dianggap lebih baik dari proposisi sebelumnya; c) Internalisasi adalah tahap di mana realitas objektif hasil ciptaan manusia yang diserap oleh manusia kembali. Jadi, ada hubungan berkelanjutan antara realitas internal dengan realitas eksternal atau proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Nilai-nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek baik agama, budaya, norma sosial dll. Pemaknaan atas nilai inilah yang mewarnai pemaknaan dan penyikapan manusia terhadap diri, lingkungan dan kenyataan di sekelilingnya.

Dalam sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial Berger, manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan obyektif

mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif. Dalam konsep berpikir dialektis, Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat.

Salah satu inti dari sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosiokultural. Proses dialektis itu mencakup tiga momen simultan yakni proses eksternalisasi yakni proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Hal ini adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisis ataupun mentalnya. Objektivasi adalah disandangnya produk-produk aktifitas itu dalam interaksi sosial dalam dengan intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses. Dan internalisasi adalah peresapan kembali realitas manusia dan mentransformasikannya dari struktur dunia objektif ke dalam struktur kesadaran dunia subjektif. Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivasi, maka masyarakat menjadi suatu realitas unik. Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat. (Berger, 1991: 5).

Proses internalisasi nilai terjadi apabila individu menerima pengaruh tersebut dan bersedia bersikap dan mematuhi dan menjalankan pengaruh tersebut sesuai dengan apa yang ia yakini sesuai dengan sistem yang dianutnya. Jadi internalisasi nilai sangat penting dalam pendidikan agama Islam, terutama bagi lembaga-lembaga pendidikan yang notabannya Islam. Karena pendidikan agama Islam merupakan pendidikan nilai sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam pada diri peserta didik, dengan pengembangan yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai dasar Islam yang merupakan manifestasi manusia religius.

Proses internalisasi harus dilakukan secara *continue* yaitu penanaman nilai secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing-learning*) karena pada hakekatnya pendidikan agama Islam itu berlangsung sepanjang hayat. Penanaman nilai agama harus dilaksanakan secara berkesinambungan serta sejalan dengan fase-

fase perkembangan pada manusia. Proses internalisasi bisa dilakukan dalam pendidikan formal, dari mulai TK, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, bisa juga dilakukan oleh guru agama ataupun guru-guru lain. (Noer Aly, 1999: 184).

Internalisasi nilai secara kontinyu akan memberikan pengalaman jiwa kepada peserta didik sehingga terbentuk sebuah kebiasaan yang utuh, permanen, dan konsisten. Penanaman nilai yang dilakukan secara kontinyu dapat diterapkan dengan pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan atau cara-cara bertindak yang *resistant, uniform*, dan hampir tidak disadari oleh pelakunya (hampir otomatis).

Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan. Metode dipilih berdasarkan strategi kegiatan yang telah dipilih dan ditetapkan. Metode merupakan cara, yang dalam kerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Namun suatu metode yang baik bagi objek tertentu belum tentu baik untuk objek yang lainnya. (Asifudin, 2010: 132). Adapun metode dapat diartikan sebagai cara-cara atau langkah-langkah dalam menyampaikan sesuatu gagasan, pemikiran, atau wawasan yang disusun secara sistematis dan terencana berdasarkan teori, konsep, dan prinsip, suatu bidang disiplin ilmu. (Nata, 2011: 175-176).

Para ahli pendidikan sepakat, bahwa salah satu tugas yang diemban oleh pendidikan adalah mewarisi nilai-nilai luhur budaya kepada peserta didik, termasuk nilai-nilai luhur agama sehingga dapat menjadi bagian dari kepribadiannya. Untuk menanamkan nilai-nilai luhur tersebut pada peserta didik bukan hal yang mudah. Usaha ini memerlukan kesabaran dan metode yang tepat.

Fuaduddin TM menyebutkan bahwa untuk melakukan penanaman nilai pada anak diperlukan kiat khusus atau metode yang sesuai dengan karakter dan jiwa anak. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan cara-cara yang akrab dan bisa dengan mudah diserap atau diterima oleh anak. Adapun cara-cara tersebut adalah memberi pembiasaan, keteladanan, nasehat, pengawasan, penghargaan dan hukuman terhadap anak. (Fuaduddin, 1996: 30).

Abuddin Nata (2011: 177) merumuskan beberapa metode dalam penanaman nilai-nilai keagamaan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pendidik: a) Metode ceramah; b) Metode Tanya Jawab; c) Metode Demonstrasi; d) Metode Karyawisata; e) Metode Penugasan; f) Metode Pemecahan Masalah; g) Metode Diskusi; h) Metode Simulasi; i) Metode Eksperimen; j) Metode Penemuan.

3. Kultur Religius

a. Pengertian Kultur Religius

Kata kultur/budaya secara etimologi dapat berupa jamak yakni menjadi kebudayaan. Kata ini berasal dari bahasa sansekerta budhayah yang merupakan bentuk jama' dari budi yang berarti akal, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan akal pikiran manusia. Kebudayaan merupakan semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti luas, kebudayaan merupakan segala sesuatu di muka bumi ini yang keberadaannya diciptakan oleh manusia. Demikian juga dengan istilah lain yang mempunyai makna sama yakni kultur yang bersal dari bahasa latin "*colere*" yang berarti mengerjakan atau mengolah. Kultur atau budaya disini dapat diartikan sebagai segala tindakan manusia untuk mengolah atau mengerjakan sesuatu. (Herminanto & Winarno, 2011: 72).

Istilah budaya mula-mula datang dari disiplin ilmu antropologi sosial. Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. (Sahlan, 2011: 43). Tylor mengartikan budaya dalam Budiningsih, (2004: 18), bahwa budaya adalah "*That complex whole which includes knowledge, beliefs, art, morals, laws, customs and other capabilities and habits acquired by man as a member of society.*" Budaya merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Religius biasa diartikan dengan kata agama, agama menurut

Frazer, sebagaimana dikutip Faturrohman, (2015:48) , adalah sistem kepercayaan yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi seseorang. Agama menurut Cliffort Greertz, sebagaimana dikutip Faturrohman,(2015:48), agama bukan hanya masalah spirit, melainkan telah terjadi hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai sumber kognitif. Agama dianggap sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman manusia yang tidak jarang telah melembaga menjadi kekuatan mistis.

Menurut Nurcholis Madjid, agama bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah. Agama dengan kata lain, meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur, atas dasar percaya atau iman kepada Allah.(Majid, 2010: 90).Perilaku religiusitas menurut teori psikoanalisis semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghindari keadaan bahaya yang akan menimpa dirinya dan memberi rasa aman bagi diri sendiri. Menurut perspektif Islam, religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah. (Ancok & Suroso, 2001: 72-79).

b. Dimensi Kultur Religius

Keberagamaan atau religiusitas, menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama atau ber-Islam secara menyeluruh. Karena itu, setiap muslim baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak, diperintahkan untuk ber-Islam. Dalam melakukan aktifitas ekonomi, sosial, politik atau aktifitas apapun, seseorang muslim diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Di manapun dan dalam keadaan apapun, setiap muslim hendaknya ber-Islam. Esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan Tuhan, tindakan menegaskan Allah sebagai yang Esa, pencipta yang mutlak dan transenden, penguasa segala yang ada.Di samping tauhid atau akidah, dalam Islam juga ada syari'ah dan akhlak. Menurut Endang Saifuddin Anshari yang dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya yang berjudul

Paradigma Pendidikan Islam, bahwa pada dasarnya Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akidah, syari'ah, dan akhlak, dimana tiga bagian tadi satu sama lain saling berhubungan. (Muhaimin, 2008: 297). Jadi, keberagamaan dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam aktifitas-aktifitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang menyeluruh, Islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula.

Stark dan Glock berpendapat yang dikutip oleh Ancok & Suroso, (2001: 77-78), dalam buku yang berjudul Psikologi Islami, bahwa spiritualitas tidak lain adalah suatu komitmen religius, suatu tekad dan iktikad yang berkaitan dengan hidup keagamaan. Dalam uraiannya itu Stark dan Glock menyebutkan adanya 5 dimensi dari komitmen religius, yaitu: a) Dimensi kepercayaan (*belief*), yaitu keyakinan akan kebenaran dari pokok-pokok ajaran imannya. Tak pelak lagi, ini merupakan unsur yang amat penting dalam kekristenan, bahkan juga di agama-agama lain. Tanpa keyakinan akan kebenaran dari pokok-pokok ajaran iman, tentu seseorang tidak akan menjadi bagian dari komunitas orang beriman; b) Dimensi praktis, terdiri dari dua aspek yaitu ritual dan devosional. Ritual diuraikan sebagai suatu ibadah yang formal. Secara asasi ritual adalah bentuk pengulangan sebuah pengalaman agama yang pernah terjadi pada masa awal pembentukan agama itu sendiri. Sedangkan yang dimaksudkan dengan devosional adalah ibadah yang dilakukan secara pribadi dan informal, seperti misalnya berdoa, berpuasa; c) Dimensi pengalaman (*experience*), yaitu pengalaman berjumpa secara langsung dan subyektif dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, mengalami kehadiran dan karya Tuhan dalam kehidupannya. Pengalaman keagamaan ini (*religious experience*) bisa menjadi awal dari keimanan seseorang, tetapi juga bisa terjadi setelah seseorang mengimani suatu agama tertentu. Entahkah pengalaman itu berada di awal ataupun di tengah-tengah, pengalaman ini berfungsi untuk semakin meneguhkan iman percaya seseorang; d) Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yaitu pengetahuan tentang elemen-elemen pokok dalam iman keyakinannya, atau yang sering kita kenal dengan dogma, doktrin

atau ajaran gereja. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan dimensi pertama (kepercayaan). Seseorang akan terbantu untuk menjadi semakin yakin dan percaya apabila ia mengetahui apa yang dipercayainya; e) Dimensi etis, di mana umat mewujudkan tindakan imannya (*act of faith*) dalam kehidupan sehari-harinya. Dimensi etis ini mencakup perilaku, tutur kata, sikap dan orientasi hidupnya. Dan hal ini tentu saja dilandasi pada pengenalan atau pengetahuan tentang ajaran agamanya dan percaya bahwa apa yang diajarkan oleh agamanya adalah benar adanya.

Ancok dan Suroso, (2001: 79), berpendapat bahwa konsep Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam. Walaupun tidak sepenuhnya sama, dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan akidah, dimensi praktik agama disejajarkan dengan syariah dan dimensi pengalaman disejajarkan dengan akhlak. Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut: a) Akidah, secara etimologi yaitu kepercayaan. Sedangkan secara terminologi disamakan dengan keimanan, yang menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya yang bersifat fundamentalis dan dogmatis. Di dalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para Malaikat, para Nabi/Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka serta qadha dan qadar; b) Syariah, merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung seorang muslim dengan Allah dan sesama manusia, yang menunjukkan seberapa patuh tingkat ketaatan seorang muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya. Dalam Islam dimensi syariah meliputi pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca al-Qur'an, berdoa, berdzikir dan sebagainya; c) Akhlak, dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan sesama manusia. Dalam Islam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, kerjasama, menegakkan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, menjaga amanat dan menjaga lingkungannya.

c. Proses Penciptaan Kultur Religius

Stolp dan Smith membagi tiga lapisan kultur yaitu artifak di permukaan, nilai-nilai keyakinan di tengah, dan asumsi di dasar. Artifak adalah lapisan kultur sekolah yang segera dan paling mudah diamati seperti aneka hal ritual sehari-hari di sekolah, berbagai upacara, benda-benda simbolik di sekolah, dan aneka ragam kebiasaan yang berlangsung di sekolah. Keberadaan kultur ini dengan cepat dapat dirasakan ketika orang mengadakan kontak dengan suatu sekolah. Lapisan kultur sekolah yang lebih dalam berupa nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah. Hal ini menjadi ciri utama suatu sekolah. Sebagian berupa norma-norma perilaku yang diinginkan sekolah seperti ungkapan rajin pangkal pandai, air beriak tanda tak dalam, dan berbagai penggambaran nilai dan keyakinan lainnya. Lapisan paling dalam kultur sekolah adalah asumsi, asumsi yaitu simbol-simbol, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang tidak dapat dikenali tetapi terus menerus berdampak terhadap perilaku warga sekolah. (Tim Peneliti Program Pascasarjana UNY, 2003: 7).

Usaha penanaman nilai-nilai religius di sebuah komunitas ada beberapa nilai yang dapat dikembangkan. Antara lain telah disampaikan oleh Asmaun Sahlan dalam bukunya bahwa beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Islam diantaranya adalah: (1) belajar hidup dalam perbedaan, (2) membangun saling percaya (*mutual trust*), (3) membangun saling pengertian (*mutual understanding*), (4) menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), (5) terbuka dalam berfikir, (6) apresiasi dan interdependensi, (7) resolusi konflik. (Sahlan, 2011:50-55).

Usaha penanaman nilai-nilai religius disampaikan pula oleh Tafsir, (2004: 112), bahwa strategi yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan untuk membentuk budaya religius sekolah, diantaranya melalui: (1) memberikan contoh (teladan), (2) membiasakan hal-hal yang baik, (3) menegakkan disiplin, (4) memberikan motivasi dan dorongan, (5) memberikan hadiah terutama psikologis, (6) menghukum (mungkin dalam rangka kedisiplinan), (7) penciptaan suasana religius yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak.

Penciptaan suasana religius dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan lembaga pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya religius di lingkungan lembaga pendidikan antara lain: (1) melakukan pengembangan kebudayaan religius secara rutin pada hari-hari efektif belajar, (2) menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, (3) pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal di kelas oleh guru agama, namun dapat dilakukan di luar proses pembelajaran, (4) menciptakan suasana religius, dengan pengadaan tempat ibadah, pengadaan alat-alat sholat, penempelan kaligrafi di kelas-kelas, mengucapkan salam, mengawali pelajaran dengan membaca doa, (5) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat dan kreativitas dalam seni membaca al-Qur'an, adzan, hafalan al-Qur'an, (6) menyelenggarakan berbagai macam perlombaan nuansa islami yang menjiwai nilai-nilai islam (kejujuran, benar dan salah, adil, amanah, jiwa sportif, mandiri, agar dapat menyampaikan pesan-pesan islami), (7) diselenggarakannya aktifitas seni seperti nasyid, pidato bahasa Arab, membaca al-Qur'an dengan *tilawah* dan *tartil*, dan lain sebagainya. (Faturrohman, 2015: 108-110).

Semua kegiatan yang melibatkan semua warga lembaga pendidikan harus mengandung unsur nilai-nilai Islam. Kegiatan dan usaha untuk merangsang tumbuhnya budaya religius harus dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus, sehingga dengan adanya pemaksaan dalam pelaksanaan kegiatan dan rutin, maka akan tumbuh sebuah kebiasaan dan dari kebiasaan tersebut maka akan tumbuh kebudayaan.

Penciptaan kultur religius yang dapat ditempuh dengan beberapa model ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan beserta penerapan nilai-nilai yang mendasarinya. Menurut Muhaimin, (2008: 306-307), dalam bukunya ada 3 model dalam penciptaan suasana religius, yakni: a) Model Struktural, yakni penciptaan suasana religius yang disemangati oleh

adanya peraturan-peraturan, pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga pendidikan atau suatu organisasi. Model ini biasanya bersifat *top-down*, yakni kegiatan keagamaan yang dibuat atas prakarsa atau instruksi dari pejabat/pimpinan atasan; b) Model Formal, yaitu penciptaan suasana religius yang didasari atas pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya manusia untuk mengajarkan masalah-masalah kehidupan rohani/akhirat saja, sehingga pendidikan agama masalah kehidupan dunia dianggap tidak penting. Model ini biasanya menggunakan cara pendekatan yang bersifat keagamaan yang normatif, doktriner (*doctrinaire*), dan absolut. Peserta didik diarahkan untuk menjadi pelaku agama yang loyal, memiliki sikap keberpihakan, dan dedikasi; c) Model Mekanik, adalah penciptaan suasana religius yang didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya.

Masing-masing gerak bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan yang lain bisa saling berkonsultasi. Model mekanik berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau dimensi afektif daripada kognitif dan psikomotorik; d) Model Organik, yakni penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan atau sebagai sistem yang berusaha mengembangkan pandangan agamis, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup yang religius. Model ini berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang dibangun dari *fundamental doctriens* dan *fundamental values* yang tertuang dan terkandung dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah as-Sahihah* sebagai sumber pokok. Kemudian bersedia dan mau menerima kontribusi pemikiran para ahli serta mempertimbangkan konteks historisitasnya. Karena itu nilai-nilai islam didudukkan sebagai sumber konsultasi yang baik dan

bijak. Sementara aspek kehidupan yang lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai relasi horizontal-lateral tetapi harus berhubungan vertikal-linier dengan nilai agama.

4. Kebijakan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Pembentukan Kultur Religius Mahasiswa

Kebijakan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Pembentukan Kultur Religius Mahasiswa yakni, adanya sekumpulan keputusan yang diambil seorang kepala atau beberapa kelompok orang dalam sebuah lembaga, sebagai proses menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berlandaskan keimanan. Kebijakan yang akan diterapkan tidak lain adalah untuk mencapai visi dan misi lembaga yang sudah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam yang telah dirumuskan, maka hasil dari kebijakan tersebut adalah untuk pembentukan tradisi dalam berperilaku dan berbudaya yang diikuti oleh seluruh mahasiswa.

Adanya kebijakan tentunya ada sesuatu yang melatarbelakanginya, serta terdapat tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskannya. Kebijakan yang ideal tentunya harus memperhatikan setiap proses tahapannya yakni dalam proses pembuatan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan, keempat elemen ini memiliki kadar yang sama untuk keberhasilan suatu kebijakan. Dalam perumusan kebijakan pun tentunya akan tergambarkan model-model kebijakan berdasarkan alur berjalannya sebuah kebijakan, dan tentunya berdasarkan pada empat elemen proses dalam kebijakan.

Internalisasi nilai-nilai Islam adalah suatu proses yang mendalam dalam menghayati nilai-nilai agama Islam yang dipergunakan seseorang dalam menyelenggarakan tata cara hidup serta mengatur hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Proses internalisasi nilai-nilai Islam ini menjadi bagian implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh lembaga yakni terbentuknya sebuah kultur yakni kultur religius. Dalam proses implementasi penanaman nilai-nilai Islam tentunya ada beberapa tahapan dan metode yang digunakan oleh pembuat

kebijakan, yang akan diterapkan kepada seluruh mahasiswa yang menjadi objek penerima kebijakan.

Tujuan dari kebijakan internalisasi nilai-nilai islam yakni terbentuknya kultur religius mahasiswa. Budaya religius yang peneliti maksud adalah keseluruhan yang kompleks yang lahir dari pemikiran dan pembiasaan akhlak karimah yang tercerminal dalam pribadi mahasiswa yang terlihat dalam tingkah lakunya dengan berlandaskan keimanan kepada Allah. Teori yang peneliti gunakan dalam melihat metode dan tahapan kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembentukan kultur religius mahasiswa yakni teori Peter L. Berger. Bahwasannya ada 3 tahapan dalam interaksi individu dengan instansinya, yakni tahapan eksternalisasi nilai, objektivasi, dan internalisasi nilai.

Latar belakang perumusan kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam LPSI Universitas Ahmad Dahlan kampus 3 didasari oleh misi Muhammadiyah dan alasan pendirian LPSI, yaitu: (a) alasan teologi *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*; (b) alasan objektif sosiologis yang mendorong syiar dakwah keislaman; dan (c) alasan tanggung jawab struktural sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, yakni selain memiliki misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Universitas Ahmad Dahlan mempunyai misi dalam pengembangan studi keislaman dan kemuhammadiyah.

Metode internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembentukan kultur religius mahasiswa di UAD kampus 3 yang diterapkan oleh LPSI yakni, pihak LPSI melihat kesuaian aktifitas sosio-kultural mahasiswa. Dalam aktifitas sosio-kultural mahasiswa terdapat 3 tahapan yaitu, eksternalisasi nilai, objektivitas, dan internalisasi nilai. Pada tahapan eksternalisasi nilai, pihak LPSI bekerjasama dengan panitia Program Pengenalan Kampus (PPK) dalam memberikan informasi penting terkait program islamisasi kampus. Pada tahap objektivitas, pihak LPSI bekerjasama dengan seluruh dosen AIK dan sertifikasi, pembimbing kegiatan *tahsinul-Qur'an* dan organisasi mahasiswa dalam memberikan ilmu pengetahuan agama Islam. Pada tahapan internalisasi nilai, terdapat ranah akademik dan

nonakademik, dalam ranah akademik para dosen menggunakan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, pemecahan masalah, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan persamaan referensi. Dalam ranah nonakademik, organisasi mahasiswa mengadakan kajian rutin, pelatihan dan lomba-lomba yang bertema Islami.

Proses penciptaan kultur religius mahasiswa yang terjadi di UAD kampus 3, berawal dari adanya visi dan misi serta tujuan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) Universitas Ahmad Dahlan yang religius, kemudian dari visi dan misi tersebut melahirkan beberapa kebijakan: pertama, mewajibkan seluruh mahasiswa UAD kampus 3 untuk menempuh mata kuliah AIK dan sertifikasi demi penanaman nilai-nilai Islam (dimensi akidah) dalam diri mahasiswa. Kedua, kebijakan wajib mengikuti Tes Baca al-Qur'an (TBQ) serta bimbingan tahsinul Qur'an, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa UAD kampus 3 dalam membaca dan memahami kitab suci agama Islam (dimensi syari'ah). Ketiga, kebijakan untuk berpakaian/berbusana syar'i ketika berada dilingkungan kampus untuk menumbuhkan kesopanan dan kerapian mahasiswa UAD kampus 3 (dimensi akhlak). Model penciptaan kultur religius mahasiswa dilakukan pihak LPSI dengan model struktural (*top-down*).

Evaluasi kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) dalam pembentukan kultur religius mahasiswa di UAD kampus 3, untuk evaluasi formulasi kebijakan LPSI yaitu menggunakan pendekatan rasional dan strategi. Untuk implementasi kebijakan, pihak LPSI meminta legitimasi kepada Rektor UAD untuk mendapatkan pengesahan pengimplementasian sebuah kebijakan. Evaluasi kinerja kebijakan, pihak LPSI bekerjasama dengan seluruh dosen AIK dan sertifikasi serta pembimbing kegiatan tahsinul Qur'an dan organisasi mahasiswa UAD kampus 3 dalam pelaksanaan kegiatan islamisasi kampus. Evaluasi lingkungan kebijakan, bahwa lingkungan UAD kampus 3 sangatlah mendukung terciptanya kultur religius mahasiswa, dengan adanya tempat ibadah yang nyaman, menyediakan beberapa alat sholat dan al-Qur'an, kotak infaq, kaligrafi di dinding kampus,

motivasi-motivasi islami, serta foto besar mahasiswa dengan busana syar'i. Keseluruhan proses kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam LPSI dalam pembentukan kultur religius mahasiswa UAD kampus 3, yakni dalam kriteria kecukupan (*adequacy*), dimana masih terdapat beberapa mahasiswa UAD kampus 3 yang belum berpakaian syar'i, merokok di lingkungan kampus, dan ada yang memanipulasi tanda tangan pembimbing kegiatan *tahsinul-Qur'an* untuk mendapatkan sertifikat kelulusan Tes Membaca al-Qur'an.

C. Simpulan

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala lembaga atau pihak yang berwewenang haruslah mengacu pada visi dan misi serta tujuan yang diinginkan. Selain mengacu pada hal tersebut, kepala lembaga harus mempertimbangkan dengan matang latar belakang perumusan sebuah kebijakan, baik dari sisi efektifitas, efisiensi, dan strateginya agar kebijakan tersebut mampu dikatakan berhasil. Dalam kondisi sosio-kultural sebuah lembaga yang akan dibentuk menjadi masyarakat yang mempunyai kultur religius, maka kepala lembaga harus dapat menentukan dan memahami sebuah tahap penanaman nilai-nilai Islam pada masing-masing individu yang ada di dalamnya. Bahwasannya masyarakat dalam kondisi sosio-kultural akan mengalami 3 tahapan, yakni eksternalisasi nilai, objektivitas, dan internalisasi nilai.

Pada tahapan internalisasi nilai-nilai, yakni nilai-nilai Islam seorang kepala lembaga harus dapat menentukan metode-metode yang sesuai dengan objek dan sasaran. Sehingga ketika seseorang sudah mampu untuk mengaktualisasikan sebuah nilai yang diyakininya maka proses internalisasi nilai tersebut telah berhasil dilakukan. Untuk dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang berkultur religius, maka kinerja pembuat kebijakan serta lingkungan kebijakan harus mendukung semua program yang akan diimplementasikan. Efektifitas implementasi sebuah kebijakan semua tergantung pada proses kebijakan yang dimulai dari: agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. 2006. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Aly, Hary Noer. 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Ancok, Djameludin dan Fuat Nashori Suroso. 2001. *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-problem Psikologi*. cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asifudin, Ahmad Janan. 2010. *Mengungkit Pilar-pilar Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis*. cet. II; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bell, Les dan Howard Stevenson. 2006. *Education Policy Proces, Themes and Impact*. USA & Canada: Routledge, Milton Park.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Budiningasih, Asri. 2004. *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Peserta Didik dan Budayanya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, dkk. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Arkola.
- Faturrohman, Muhammad. 2015. *Budaya Religius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstualisasi Pendidikan Agama di Sekolah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Furchan, Arief. 2004. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herminanto dan Winarno. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Imron, Ali. 2001. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Khotimah, Chusnul dan Muhammad Fathurrohman. 2014. *Komplemen Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Integratif Pelengkap Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Madjid, Nurcholis. 2010. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Muhaimin. 2008. *Paradigma pendidikan Agama Islam: Upaya Untuk Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. 2011. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosyadi, Khoiron. 2004. *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sagala, Syaiful. 2000. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sahlan, Asmaun. 2011. *Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Pengembangan Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. XVI; Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Tafsir, Ahmad. 2004. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Peneliti Program Pascasarjana UN. 2003. *Pedoman Pengembangan Kultur Sekolah*, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Diknas.
- TM, Fuaduddin. 1996. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Muslim*. Jakarta: KAJ.
- Wahab, Sholichin Abdul. 1991. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan